



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SALINAN

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP

DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan kearsipan diperlukan sistem yang memenuhi prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang mampu merespon tuntutan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan arsip di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu memenuhi unsur autentisitas dan reabilitas arsip dalam penciptaan arsip;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, klasifikasi arsip di masing-masing kementerian/lembaga ditetapkan oleh Pimpinan Pencipta Arsip sebagai acuan dalam pengelolaan arsip dinamis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
5. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan Arsip.
6. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

dengan konteksi kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.

7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.
8. Unit Kerja adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
9. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip LPSK meliputi:
 - a. substantif; dan
 - b. fasilitatif.
- (2) Arsip substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi bidang:
 - a. perumusan kebijakan;
 - b. penelaahan permohonan;
 - c. persidangan dan administrasi putusan; dan
 - d. pemenuhan hak saksi dan korban.
- (3) Arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

- c. kerumahtanggaan;
- d. pengelolaan barang milik negara;
- e. teknologi informasi dan komunikasi;
- f. pengadaan barang dan jasa;
- g. pengawasan;
- h. hukum;
- i. organisasi dan tata laksana;
- j. kerjasama;
- k. informasi dan hubungan masyarakat;
- l. kearsipan;
- m. kepustakaan; dan
- n. kepegawaian.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan LPSK menggunakan kode Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urutan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LPSK ini.

Pasal 4

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2020

KETUA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HASTO ATMOJO SUROYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 594

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



HASTO ATMOJO SUROYO



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 7 -

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ARSIP SUBSTANTIF	
PK	PERUMUSAN KEBIJAKAN
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan pengusulan perlindungan saksi dan korban.
01	Penyiapan Kebijakan
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan kebijakan perlindungan saksi dan korban.
02	Perumusan dan Penyusunan Bahan
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan perlindungan saksi dan korban.
03	Pemberian Masukan (<i>Hearing</i>) dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian masukan (<i>hearing</i>) dan dukungan dalam penyusunan kebijakan perlindungan saksi dan korban.
04	Penetapan
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kebijakan perlindungan saksi dan korban.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 8 -

PP	PENELAHAAN PERMOHONAN	
00	Sumber Informasi Penerimaan dan Penelaahan Permohonan	
	00.00	Penerimaan dan penelaahan permohonan datang langsung
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan permohonan, pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum, pemberian perlindungan darurat , dan penanganan cepat yang melalui datang langsung.
	00.01	Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui surat elektronik (<i>email</i>)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan permohonan, pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum, pemberian perlindungan darurat, dan penanganan cepat yang melalui surat elektronik (<i>email</i>).
	00.02	Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui aplikasi daring
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan permohonan, pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum, pemberian perlindungan darurat, dan penanganan cepat yang melalui aplikasi daring.
	00.03	Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui call center 148
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan permohonan, pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum, pemberian perlindungan darurat, dan penanganan cepat yang melalui call center 148.
	00.04	Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui layanan pro aktif
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan permohonan, pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum, pemberian perlindungan darurat, dan penanganan cepat yang melalui layanan pro aktif (tindakan proaktif).



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 9 -

	00.05	Penerimaan dan penelaahan permohonan perlindungan darurat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan permohonan, pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum, pemberian perlindungan darurat, dan penanganan cepat yang melalui layanan perlindungan darurat.
01	Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Telaahan	
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan hasil dan tindak lanjut penelaahan.
02	Investigasi dan Penilaian	
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan awal permohonan pengajuan kompensasi dan restitusi serta seluruh proses investigasi mulai dari pengajuan kegiatan sampai dengan laporan kegiatan.
PA	PERSIDANGAN DAN ADMINISTRASI PUTUSAN	
00	Penyiapan persidangan	
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan dukungan persidangan sampai dengan hasil putusan.
01	Administrasi Putusan Rapat Paripurna	
	01.00	Putusan diterima
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan putusan rapat paripurna diterima.
	01.01	Putusan ditolak
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan putusan rapat paripurna ditolak.
	01.02	Putusan ditolak dan diberikan rekomendasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan putusan rapat paripurna ditolak dan diberikan rekomendasi.
	01.03	Putusan dihentikan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan putusan rapat paripurna dihentikan.
	01.04	Putusan diperpanjang



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 10 -

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan putusan rapat paripurna diperpanjang.
	01.05	Putusan penambahan layanan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan putusan penambahan layanan.
HS	PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN	
00	Penyiapan Layanan	
	00.00	Penelaahan Layanan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses kegiatan persiapan penelaahan layanan mulai dari berita acara serah terima berkas permohonan dari biro yang memiliki fungsi penelaahan permohonan kepada biro yang memiliki fungsi pemenuhan hak saksi dan korban, berkas - berkas yang muncul dari hasil investigasi dan penilaian Terlindung, hasil rapat paripurna, surat pemberitahuan diterimanya perlindungan, rencana proses pemberian layanan, hingga pengajuan kegiatan dan analisis kasus.
	00.01	Laporan Hasil Penelaahan Layanan dan Risalah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan laporan hasil penelaahan layanan dan risalah pelaksanaan layanan perlindungan antara lain terdiri dari: - Laporan hasil penelaahan sifat pentingnya keterangan saksi / korban. - Laporan hasil penelaahan resiko ancaman. - Laporan pelaksanaan perlindungan darurat. - Laporan hasil investigasi, dll
01	Pelaksanaan Pemberian Layanan	
	01.00	Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 11 -

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukung lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya / audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll.
	01.01	Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 12 -

		perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukung lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya / audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll.
	01.02	Tindak Pidana Terorisme
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Tindak Pidana Terorisme, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukung lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya/audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 13 -

01.03	Tindak Pidana Perdagangan Orang
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukung lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya/audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 14 -

01.04	Narkotika dan Psikotropika
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Narkotika dan Psikotropika, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukung lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya/ audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 15 -

01.05	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukung lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya/ audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 16 -

01.06	Tindak Pidana Penyiksaan
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Tindak Pidana Penyiksaan, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukung lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya/ audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 17 -

01.07	Tindak Pidana Penganiayaan Berat
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukung lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya/ audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 18 -

	01.08	Tindak Pidana Lainnya
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Tindak Pidana Lainnya yang ditentukan oleh Rapat Paripurna, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukung lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya / audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll.
02	Laporan Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan dan risalah pelaksanaan layanan perlindungan, antara lain terdiri dari: - Laporan bulanan pelaksanaan layanan yang diberikan oleh LPSK. - Risalah perpanjangan perlindungan. - Risalah penambahan jenis layanan atau risalah pengurangan / penghentian salah satu layanan. - Risalah penghentian layanan perlindungan, dll.
03	Paska Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	
	03.00	Paska Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 19 -

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan paska layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, antara lain terdiri dari: - Surat-surat dari pihak eksternal yang diterima setelah layanan perlindungan berakhir. - Dokumen pendukung lainnya yang diperoleh setelah masa layanan perlindungan berakhir (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya termasuk audio dan visual).
	03.01	Laporan Pemantauan Paska Layanan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan laporan pemantauan paska pelaksanaan layanan perlindungan antara lain: - Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan layanan perlindungan. - Laporan perkembangan kondisi dan situasi Terlindung setelah layanan perlindungan dihentikan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 20 -

ARSIP FASILITATIF		
PR	PERENCANAAN	
00	Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan	
	00.00	Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang / Master Plan (RPJP).
	00.01	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
	00.02	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan musyawarah perencanaan pembangunan.
	00.03	Rencana Strategis
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategis (Renstra) diantaranya yaitu Renstra Lembaga, Renstra Eselon I dan Restra Eselon II.
01	Rencana dan Program Kerja Tahunan (PKT)	
	01.00	Rencana Kerja LPSK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja LPSK.
	01.01	Usulan unit kerja beserta data pendukung
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan unit kerja beserta data pendukung.
	01.02	Usulan LPSK ke Instansi terkait
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan LPSK ke instansi terkait yang menjadi mitra strategis LPSK.
	01.03	Program Kerja Tahunan Unit Kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan program kerja tahunan unit kerja.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 21 -

	01.04	Program Kerja Tahunan LPSK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan program kerja tahunan LPSK.
	01.05	Hasil Rapat Dengar Pendapat DPR
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari hasil Rapat Dengar Pendapat DPR.
	01.06	Rapat Pimpinan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari hasil Rapat Pimpinan.
	01.07	Rakor Internal LPSK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari hasil Rapat Koordinasi Internal LPSK.
	01.08	Usulan Khusus
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usulan Khusus.
02	Penetapan Kontrak Kinerja	
	02.00	Penetapan Kinerja Eselon I dengan Ketua LPSK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja antara Eselon I dengan Ketua LPSK.
	02.01	Penetapan Kinerja Unit Kerja (Eselon II, III, dan IV)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti Eselon IV dengan Eselon III, Eselon III dengan Eselon II, dan Eselon II dengan Eselon I.
	02.02	Indikator Kinerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Indikator Kinerja IKU dan IK.
03	Penyusunan Laporan	
	03.00	Laporan Berkala
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala diantaranya yaitu Laporan Harian Unit Kerja, Laporan Mingguan Unit Kerja, Laporan Bulanan Unit Kerja, Laporan Triwulan Unit Kerja, Laporan Semesteran Unit Kerja, Laporan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 22 -

		Tahunan Unit Kerja, Laporan Tahunan LPSK (termasuk diantaranya yaitu Laptah LPSK, Laporan Monev dll).
	03.01	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Laporan Kinerja (LAKIN)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Laporan Kinerja (LAKIN) unit kerja dan LPSK.
	03.02	Laporan Insidental / Khusus
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, laporan pelaksanaan kegiatan / program tertentu, dan laporan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI atau laporan Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI.
04	Evaluasi Program	
	04.00	Evaluasi Program Unit Kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi program unit kerja.
	04.01	Evaluasi Program LPSK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi program LPSK.
	04.02	Rekomendasi Kinerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rekomendasi kinerja.
05	Penyusunan Anggaran	
	05.00	Kebijakan / Peraturan Penganggaran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan / peraturan penganggaran.
	05.01	Ketetapan Pagu Indikatif / sementara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan ketetapan pagu indikatif / sementara.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 23 -

	05.02	Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) LPSK dengan pihak eksternal (Komisi III DPR dan lainnya)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) LPSK dengan pihak eksternal (Komisi III DPR dan lainnya).
	05.03	Ketetapan Pagu Definitif
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Ketetapan Pagu Definitif.
	05.04	Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) LPSK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) LPSK.
	05.05	Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
	05.06	Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP).
	05.07	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 24 -

	05.08	Anggaran Biaya Tambahan (ABT)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
	05.09	Standar Biaya Keluaran (SBK)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Standar Biaya Keluaran (SBK).
KU	KEUANGAN	
00	Pelaksanaan Anggaran	
	00.00	Peraturan, Pedoman, dan Kebijakan LPSK terkait Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan, Pedoman, dan Kebijakan LPSK terkait Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.
01	Dokumen Realisasi Pendapatan	
	01.00	Surat Setoran Pajak (SSP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Surat Setoran Pajak (SSP).
	01.01	Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
	01.02	Bukti Setor Pengembalian Belanja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Bukti Setor Pengembalian Belanja.
	01.03	Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank.
	01.04	Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari Satuan Kerja



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 25 -

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari Satuan Kerja.
	01.05	Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara.
02	Belanja	
	02.00	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang habis pakai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang habis pakai diantaranya seperti: Pengumuman lelang, Dokumen prakualifikasi, Dokumen Peninjauan Lapangan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Pelelangan, Usulan Calon Pemenang, Penetapan Pemenang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak/Addendum Kontrak, dan Serah terima barang dan jasa.
	02.01	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang Bergerak/Barang Inventaris
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang Bergerak/Barang Inventaris diantaranya seperti: Pengumuman lelang, Dokumen prakualifikasi, Dokumen Peninjauan Lapangan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Pelelangan, Usulan Calon Pemenang, Penetapan Pemenang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak/Addendum Kontrak, dan Serah terima barang dan jasa.
	02.02	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Bangunan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Bangunan diantaranya seperti: Pengumuman lelang, Dokumen prakualifikasi, Dokumen Peninjauan Lapangan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Pelelangan, Usulan Calon Pemenang, Penetapan Pemenang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak/Addendum Kontrak, dan Serah terima barang dan jasa.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 26 -

	02.03	Dokumen Pelaksanaan Pengadaaan Jasa
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Pelaksanaan Pengadaaan Jasa, diantaranya seperti: Pengumuman lelang, Dokumen prakualifikasi, Dokumen Peninjauan Lapangan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Pelelangan, Usulan Calon Pemenang, Penetapan Pemenang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak/Addendum Kontrak, dan Serah terima barang dan jasa.
	02.04	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Software Komputer
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Software Komputer diantaranya seperti: Pengumuman lelang, Dokumen prakualifikasi, Dokumen Peninjauan Lapangan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Pelelangan, Usulan Calon Pemenang, Penetapan Pemenang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak/Addendum Kontrak, dan Serah terima barang dan jasa.
	02.05	Dokumen Pembayaran Keuangan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Pembayaran Keuangan, diantaranya yaitu: Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas, Bukti-Bukti Tagihan dari Pihak Ketiga, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan (SP3).
03	Pembukuan Anggaran	
	03.00	Buku Kas Umum (BKU)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Buku Kas Umum (BKU).
	03.01	Buku Kas Pembantu (BKP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Buku Kas Pembantu (BKP).
	03.02	Buku / Kartu Pengawasan Kredit Anggaran



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 27 -

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Buku / Kartu Pengawasan Kredit Anggaran.
	03.03	Rekening Koran Bank
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Rekening Koran Bank.
	03.04	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.
	03.05	Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Daftar Rekapitulasi Keuangan.
	03.06	Daftar Rekapitulasi Pihak Ketiga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Daftar Rekapitulasi Pihak Ketiga.
	03.07	Daftar Rekapitulasi PNPB
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Daftar Rekapitulasi PNPB
	03.08	Izin Penggunaan Kas Besi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan Izin Penggunaan Kas Besi.
04	Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/ Honorarium/Uang Makan	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/ Honorarium/Uang Makan.	
05	Kartu Gaji	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Kartu Gaji.	
06	Dokumen Akuntansi Keuangan	
	06.00	Berita Acara Pemeriksaan Kas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas.
	06.01	Kas/ Register Penutupan Kas



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 28 -

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Kas/ Register Penutupan Kas.
	06.02	Arsip Data Komputer (ADK)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Arsip Data Komputer (ADK).
	06.03	Laporan Pendapatan Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen laporan Pendapatan Negara.
	06.04	Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) bulanan/triwulanan/semesteran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) bulanan/triwulanan/semesteran.
	06.05	Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan KPPN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan KPPN.
07	Laporan perkembangan realisasi penerimaan, realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Laporan perkembangan realisasi penerimaan, realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.	
08	Laporan Keuangan Tahunan	
	08.00	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
	08.01	Neraca Keuangan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Neraca Keuangan.
	08.02	Laporan Arus Kas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Laporan Arus Kas.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 29 -

	08.03	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
	08.04	Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA).
	08.05	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
	08.06	Monev Pelaksanaan Anggaran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Monev Pelaksanaan Anggaran.
09	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	
	09.00	Manual Implementasi dan Kebijakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Manual Implementasi dan Kebijakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
	09.01	Kebijakan Akuntansi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Kebijakan Akuntansi.
	09.02	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
	09.03	Laporan Realisasi Bulanan /Triwulan/Semester SAI
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Laporan Realisasi Bulanan /Triwulan/Semester SAI.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 30 -

10	Pertanggungjawaban Keuangan Negara	
	10.00	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
	10.01	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh inspektorat atau unit pengawasan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh inspektorat atau unit pengawasan.
	10.02	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional, diantaranya yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP), dan Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP.
	10.03	Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara, diantaranya yaitu Tuntutan Perbendaharaan / TP, dan Tuntutan Ganti Rugi / TGR.
11	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri	
	11.00	Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen dan Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Blue Book).
	11.01	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green book)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green book</i>).
	11.02	Dokumen <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> , dan Dokumen



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 31 -

		Sejenisnya
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> , dan Dokumen Sejenisnya.
	11.03	Dokumen <i>Loan Agreement</i> Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal Opinion, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen <i>Loan Agreement</i> Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal Opinion, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender.
	11.04	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana.
	11.05	Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berikut lampirannya: <i>Reimbursement, Direct Payment/Transfer Procedure, Special Commitment/ L/C Opening, Special Account/Imprest Fund</i> , Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri, <i>Notice Of Disbursement</i> .
	11.06	Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>).
	11.07	Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/ Hibah Luar negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan SPM
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/ Hibah Luar negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 32 -

	11.08	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor meliputi antara lain: <i>No Objection Letter (NOL)</i> , <i>Project Implementation</i> , <i>Notification of Contract</i> , <i>Withdrawal Authorization (WA)</i> , <i>Statement of Expenditure (SE)</i> .
	11.09	Staff Appraisal Report
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Staff Appraisal Report.
	11.10	Report /Laporan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Report /Laporan yang terdiri dari Progress Report, Monthly Report, Quarterly Report, dan Final Report/Completion Report.
	11.11	Laporan Hutang Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Laporan Hutang Negara yang terdiri dari Laporan Pembayaran Hutang Negara, dan Laporan Posisi Hutang Negara.
	11.12	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
12	Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
	12.00	Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan yang terdiri dari: Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang / Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan / Pengeluaran, Pengelola Barang termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 33 -

13	Verifikasi Anggaran	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertasi dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran. Termasuk di dalamnya Nota hasil verifikasi dan jawaban nota hasil verifikasi.	
RT	KERUMAHTANGGAAN	
00	Pengadaan	
	00.00	Analisa Kebutuhan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen usulan dan Analisa Kebutuhan Pengadaan.
	00.01	Pertimbangan Pelaksanaan Pengadaan (Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung/Lelang)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Pertimbangan Pelaksanaan Pengadaan (Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung/Lelang) pada kegiatan pengadaan.
	00.02	Daftar Rekanan Mampu
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengenalan dan penawaran untuk menjadi rekanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
	00.03	Serah Terima Barang
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Serah Terima Barang.
01	Pendistribusian	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen penyimpanan dan pendistribusian barang yang terdiri dari: Daftar barang masuk / keluar, Surat Bukti Barang masuk / keluar, Daftar inventaris barang Milik Negara (BMN), dan Surat Jalan.	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 34 -

02	Telekomunikasi	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Administrasi penggunaan langganan peralatan telekomunikasi meliputi: telepon, radio, fax, TV Kabel dan Internet.	
03	Administrasi Penyediaan Konsumsi, Ruang Rapat dan Akomodasi	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Administrasi Penyediaan Konsumsi, Ruang Rapat dan Akomodasi.	
04	Pengurusan Kendaraan Dinas	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pengelolaan kendaraan dinas diantaranya yaitu Pengurusan surat surat kendaraan dinas, Pemeliharaan dan perbaikan, dan Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan.	
05	Pengelolaan Bangunan Gedung dan Taman	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Pengelolaan Bangunan Gedung dan Taman diantaranya seperti Pertamanan / landscaping, Perbaikan dan pemeliharaan bangunan Gedung, Perbaikan dan pemeliharaan bangunan Rumah aman, Kebersihan gedung dan taman.	
06	Pengelolaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Pengelolaan (termasuk perbaikan / pemeliharaan/ pemasangan) jaringan listrik, air, telepon, dan sarana prasarana lainnya.	
07	Penghematan Energi	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kegiatan Penghematan energi.	
08	Ketertiban dan Keamanan	
	08.00	Pengamanan, penjagaan, dan pengawalan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kegiatan pengamanan, penjagaan, dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas. Diantaranya meliputi daftar nama satuan pengamanan, daftar jaga/daftar piket, catatan gangguan/pelanggaran/kejadian, dan surat ijin keluar masuk



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 35 -

		orang atau barang.
	08.01	Laporan Ketertiban dan Keamanan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen laporan ketertiban dan keamanan yang terdiri dari kehilangan, kerusakan, kecelakaan, dan gangguan.
09	Administrasi Pengelolaan Parkir	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kegiatan administrasi pengelolaan parkir.	
10	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kegiatan Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya.	
11	Pengadaan <i>Outsourcing</i>	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Pengadaan <i>Outsourcing</i> .	
12	Ijin Peminjaman Sarana dan Prasarana	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kegiatan ijin peminjaman sarana dan prasarana berupa alat - alat, ruangan, lapangan, lahan parkir, mobil, dll).	
13	Sumbangan dan Bantuan	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen sumbangan dan bantuan.	
BM	PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)	
00	Simak BMN	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengisian dan penginputan pada aplikasi simak BMN.	
01	Pembukuan BMN	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembukuan BMN seperti daftar barang kuasa / pengguna, kartu identitas barang, dan buku penerimaan BNPB.	
02	Daftar Barang Ruangan	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan daftar barang	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 36 -

	ruangan.	
03	Inventaris BMN	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi BMN, diantaranya seperti: keputusan pembentukan tim, rencana kerja pelaksanaan inventarisasi, kertas kerja inventarisasi, berita acara inventarisasi, daftar inventarisasi/buku barang/daftar barang lainnya, penilaian BMN, laporan hasil inventarisasi, dan laporan tindak lanjut inventarisasi.	
04	Laporan BMN	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan BMN, diantaranya seperti laporan kondisi barang, laporan barang kuasa pengguna, berita acara rekonsiliasi internal dan eksternal, laporan persediaan barang habis pakai, dan laporan persediaan barang tidak habis pakai.	
05	Rumah Negara	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan rumah negara diantaranya seperti Surat Ijin penghunian (SIP), Pembaharuan Status Rumah Negara (sewa, sewa beli, hak milik), rekonsiliasi rumah negara dengan instansi lain, alih status rumah, dan BAST rumah negara.	
06	Tanah	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan tanah, diantaranya seperti pengurusan sertifikat baru, penggantian sertifikat yang hilang, pemecahan sertifikat induk, dan balik nama.	
07	Penggunaan BMN	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan BMN diantaranya seperti penetapan status pengguna (PSP), penggunaan sementara BMN, alih status BMN di lingkungan LPSK, Laporan penggunaan dan pemanfaatan BMN, dan pengadaan perlengkapan/barang persediaan.	
08	Pemanfaatan BMN	
	08.00	Sewa
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan BMN berupa sewa.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 37 -

	08.01	Pinjam Pakai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan BMN berupa pinjam pakai.
	08.02	Kerjasama pemanfaatan BMN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama pemanfaatan BMN.
	08.03	Bangun guna serah / Bangun serah guna
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bangun guna serah / bangun serah guna.
	08.04	Kerjasama penyediaan infrastruktur
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama penyediaan infrastruktur.
09	Pemindahtanganan BMN	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahtanganan BMN diantaranya seperti penjualan / pemusnahan BMN, tukar menukar BMN, hibah, dan penyertaan modal pemerintah Pusat / Daerah.	
10	Pengamanan dan Pemeliharaan BMN	
	10.00	Pemeliharaan BMN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan BMN diantaranya seperti kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomuinikasi dan server / hosting, perbaikan / service kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor.
	10.01	Laporan Pengamanan dan/atau pemeliharaan BMN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan pengamanan dan/atau pemeliharaan BMN.
11	Pengawasan dan pengendalian BMN	
	11.00	Pemantauan dan penertiban BMN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan penertiban BMN.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 38 -

	11.01	Laporan pengawasan dan pengendalian BMN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan laporan pengawasan dan pengendalian BMN.
12	Penghapusan dan Pemusnahan	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan dan pemusnahan BMN diantaranya seperti persiapan / pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, risalah lelang berita acara serah terima sampai dengan laporan penghapusan termasuk usul pemusnahan.	
TI	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
00	Rencana Strategis /Master Plan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM)	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rencana strategis / master plan pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM).	
01	Dokumen Arsitektur	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi arsitektur diantaranya yaitu sistem informasi, sistem aplikasi, dan infrastruktur.	
02	Dokumentasi Implementasi	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi implementasi diantaranya yaitu sistem informasi, sistem aplikasi, dan infrastruktur.	
03	Perekaman dan Pemutakhiran Data	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perekaman dan pemutakhiran data diantaranya yaitu formulir isian, daftar petugas perekaman, jadwal pelaksanaan, dan laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data.	
04	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan migrasi sistem aplikasi dan data diantaranya yaitu perencanaan dan pelaksanaan migrasi, pembuatan Berita Acara Kegiatan Migrasi, daftar sistem aplikasi dan data yang di imigrasi, dan laporan hasil imigrasi.	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 39 -

05	Dokumen hosting	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumen hosting diantaranya yaitu formulir permintaan hosting, laporan hasil uji kelayakan, laporan pelaksanaan hosting.	
06	Pengamanan Jaringan dan Layanan back up data digital	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan jaringan dan layanan back up data digital.	
07	Lisensi Perangkat TIK dan Sistem Informasi	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan lisensi perangkat TIK dan sistem informasi.	
08	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	
	08.00	Administrasi LPSE
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi LPSE.
	08.01	Aplikasi LPSE
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan aplikasi LPSE.
	08.02	Verifikasi Penyedia
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi penyedia LPSE.
	08.03	Akun
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan akun LPSE diantaranya yaitu (pejabat pengadaan, panitia pengadaan /ULP, penyedia, auditor, dan helpdesk.
	08.04	Pelatihan SPSE
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan keikutsertaan dalam pelatihan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
	08.05	Standart LPSE
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar LPSE.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 40 -

	08.06	Laporan LPSE
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan LPSE.
BJ	PENGADAAN BARANG DAN JASA	
00	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	00.00	Rencana Umum Pengadaan (RUP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
	00.01	Rencana dan Analisis Kebutuhan Barang
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan analisis kebutuhan barang diantaranya yaitu di unit kerja dan lembaga.
01	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	01.00	Lelang umum / Lelang terbatas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan lelang umum atau lelang terbatas
	01.01	Swakelola / Pengadaan Langsung/e-Purchasing/ e-catalogue
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola/pengadaan langsung/e-purchasing/e-catalogue.
	01.02	Penunjukan Langsung
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung.
	01.03	Telaah pelaksanaan lelang/pemilikan/penunjukan langsung
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan telaah atau analisis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan lelang/pemilikan/penunjukan langsung.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 41 -

	01.04	Dokumen lelang
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen lelang, diantaranya yaitu barang Inventaris Kantor/barang bergerak (Penawaran pengumuman pemenang,daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang, dan barang Investasi (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan sampai dengan kontrak dan serah terima barang.
02	Monev Pengadaan Barang dan Jasa	
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
PW	PENGAWASAN	
00	Rencana Pengawasan	
	00.00	Rencana Strategi Pengawasan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategi pengawasan.
	00.01	Rencana Kerja Tahunan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan.
	00.02	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan penetapan kinerja tahunan pengawasan.
	00.03	Penetapan Kinerja Tahunan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan penetapan kinerja tahunan pengawasan.
	00.04	Rakor Pengawasan Tingkat Nasional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rakor pengawasan tingkat nasional.
01	Pelaksanaan Pengawasan	
	01.00	Laporan yang memerlukan tindak lanjut



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 42 -

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang memerlukan tindak lanjut diantaranya seperti Kertas Kerja Audit (KKA), Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntansi (LA), Laporan Auditor Independen (LAI).
	01.01	Laporan yang tidak memerlukan tindak lanjut
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang tidak memerlukan tindak lanjut diantaranya seperti Kertas Kerja Audit (KKA), Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntansi (LA), Laporan Auditor Independen (LAI).
	01.02	Laporan yang mengandung unsur pidana dan memerlukan tindak lanjut
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengandung unsur pidana dan memerlukan tindak lanjut diantaranya seperti Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan laporan audit lainnya.
	01.03	Laporan Perkembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat baik yang datang dari internal maupun eksternal LPSK diantaranya seperti gratifikasi dan WBS.
	01.04	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan.
	01.05	Laporan LPHPN dan LHKASN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengisian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 43 -

		Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
	01.06	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan laporan perkembangan Barang Milik Negara.
	01.07	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Semesteran LPSK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan semesteran LPSK.
	01.08	Good Corporate Governance (GCG)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Good Corporate Governance (GCG).
	01.09	Laporan Hasil Evaluasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi diantaranya seperti Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), wilayah bebas korupsi, evaluasi reformasi birokrasi serta evaluasi kegiatan lainnya meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, sampai dengan pelaporan.
	01.10	Pemantauan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan pengawasan diantaranya yaitu:
		Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan / Program (proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) seperti Laporan kehilangan, Berita Acara kehilangan barang / uang, SK tanggung jawab mutlak/surat kesanggupan untuk mengganti ke kas negara, SK penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian TP - TGR, kemudian Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP), penerapan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 44 -

		early warning system dan pemantauan disiplin pegawai.
	01.11	Pembangunan Pakta Integritas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan pakta integritas.
	01.12	Manajemen Risiko
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan manajemen risiko.
	01.13	Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).
	01.14	Pengawasan bidang kearsipan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan bidang kearsipan.
HK	HUKUM	
00	Program Legislasi	
	00.00	Bahan/materi program legislasi nasional dari LPSK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan bahan/materi program legislasi LPSK maupun program legislasi nasional.
	00.01	Program legislasi lembaga / instansi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi LPSK maupun program legislasi nasional.
01	Rancangan Peraturan Perundang-undangan	
	01.00	Berkas rancangan proses penyusunan peraturan perundang-undangan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rancangan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Saksi dan Korban meliputi naskah akademik, rancangan/draft, telaah/pertimbangan hukum, administrasi penyusunan rancangan, dokumen



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 45 -

		pembahasan dan pengesahan peraturan perundang-undangan.
	01.01	Berkas rancangan proses penyusunan produk hukum LPSK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rancangan proses penyusunan peraturan produk hukum LPSK diantaranya seperti Peraturan, instruksi, keputusan, surat edaran, dan pedoman yang dikeluarkan oleh Pimpinan LPSK atau pejabat setingkat Eselon I.
	01.02	Standar / Pedoman / Prosedur kerja / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Standar / Pedoman / Prosedur kerja / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis yang bersifat nasional / regional / instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.
	01.03	Surat Perintah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerbitan surat perintah baik dari Pimpinan LPSK maupun dari pejabat setingkat Eselon I dan II.
02	Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri.	
03	Dokumentasi Hukum	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi informasi hukum dan penyebarluasan informasi hukum baik eksternal maupun internal LPSK.	
04	Soislisasi / Penyuluhan / Pembinaan Hukum	
	04.00	Bahan Materi kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan bahan materi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi / penyuluhan /



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 46 -

		pembinaan hukum.
	04.01	Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi / Penyuluhan/ Pembinaan Hukum
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi / Penyuluhan / Pembinaan Hukum.
05	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, dan advokasi yang termasuk di dalamnya yaitu berkas tentang pemberian bantuan / konsultasi hukum yaitu pidana, perdata, tata usaha negara, arbitrase, dan agama.	
06	Kasus / Sengketa Hukum	
	06.00	Pidana
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus atau sengketa hukum pidana yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis. Diantaranya terdiri dari berkas tentang kasus atau sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, berkas pembelaan dan bantuan hukum, serta telaah hukum dan opini hukum.
	06.01	Perdata
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus atau sengketa hukum perdata yang dimulai dari proses penyeldiikan, penyidikan sampai dengan vonis. Diantaranya terdiri dari berkas tentang kasus atau sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, berkas pembelaan dan bantuan hukum, serta telaah hukum dan opini hukum.
	06.02	Tata Usaha Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus atau sengketa hukum Tata Usaha Negara yang dimulai dari proses penyeldiikan, penyidikan sampai dengan vonis. Diantaranya terdiri dari berkas tentang kasus atau sengketa pidana, baik kejahatan maupun



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 47 -

		pelanggaran, berkas pembelaan dan bantuan hukum, serta telaah hukum dan opini hukum.
	06.03	Arbitrase
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus atau sengketa hukum Arbitrase yang dimulai dari proses penyeldiikan, penyidikan sampai dengan vonis. Diantaranya terdiri dari berkas tentang kasus atau sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, berkas pembelaan dan bantuan hukum, serta telaah hukum dan opini hukum.
07	Telaah Hukum	
	07.00	Telaah Hukum Regulasi Internal LPSK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan peraturan dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang ada di internal LPSK.
	07.01	Telaah Hukum Eksternal yang berkaitan dengan LPSK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat berwenang instansi selain LPSK.
08	Perizinan	
	08.00	Pemberian/ Persetujuan/ Kewenangan/ Rekomendasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian persetujuan, kewenangan atau rekomendasi perizinan kepada pihak internal maupun eksternal LPSK.
	08.01	Penolakan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penolakan perizinan kepada pihak internal maupun eksternal LPSK.
	08.02	Peringatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian peringatan kegiatan perizinan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 48 -

	08.03	Pencabutan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pencabutan kegiatan perizinan.
	08.04	Perpanjangan Izin
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian persetujuan perpanjangan izin.
	08.05	Dispensasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian dispensasi perizinan.
09	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	
	09.00	Hak Cipta
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerbitan hak cipta.
	09.01	Hak Paten Biasa dan Sederhana
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerbitan hak paten biasa dan sederhana.
	09.02	Hak Merek
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerbitan hak merek.
10	Surat Kuasa	
	10.00	Surat Kuasa Khusus
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan yang menerbitkan surat kuasa khusus.
	10.01	Surat Kuasa dengan Hak Substitusi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan yang menerbitkan surat kuasa dengan hak substitusi.
	10.02	Surat Kuasa Lainnya
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan yang menerbitkan surat kuasa lainnya.
OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
00	Struktur Organisasi LPSK	
	00.00	Pembentukan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 49 -

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan LPSK mulai dari tahap pengusulan hingga tahap pengesahan pembentukan.
	00.01	Perubahan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perubahan organisasi LPSK mulai dari tahap pengusulan hingga tahap pengesahan perubahan.
	00.02	Pembubaran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembubaran LPSK mulai dari tahap awal hingga akhir persetujuan pembubaran.
01	Organisasi	
	01.00	Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan, Analisis Jabatan, dan Analisis Beban Kerja terhadap Pejabat struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum. Termasuk didalamnya mengenai evaluasi jabatan dan kelas jabatan.
	01.01	Evaluasi Kelembagaan/Organisasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perubahan dan penyempurnaan organisasi.
	01.02	Uraian Jabatan dan Tata Kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan LPSK.
02	Tata Laksana	
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyelarasan dan pengembangan proses bisnis dan tata laksana LPSK. Termasuk di dalamnya yaitu kegiatan evaluasi proses bisnis, kegiatan penyusunan dan penyelarasan, dan monitoring serta evaluasi dari SOP AP dan mekanisme serta



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 50 -

	tata hubungan kerja.	
03	Reformasi Birokrasi	
	03.00	Implementasi Reformasi Birokrasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi yang terdiri dari kegiatan perumusan, persiapan, dan pelaksanaan pada 8 (delapan) area perubahan di lingkungan LPSK.
	03.01	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan di lingkungan LPSK.
KS	KERJASAMA	
00	Perencanaan Kerjasama antara LPSK dengan Kementerian, Lembaga, Swasta, Organisasi Masyarakat baik nasional maupun internasional	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perencanaan Kerjasama antara LPSK dengan Kementerian, Lembaga, Swasta, Organisasi Masyarakat baik nasional maupun internasional	
01	Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU)	
	01.00	Dalam Negeri
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan nota kesepahaman / memorandum of understanding (MoU) antara LPSK dengan pihak eksternal di dalam negeri.
	01.01	Luar Negeri
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan nota kesepahaman / memorandum of understanding (MoU) antara LPSK dengan pihak eksternal di luar negeri.
02	Perjanjian Kerjasama / Petunjuk Teknis Kerjasama/ Pedoman Kerja	
	01.00	Dalam Negeri
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan nota Perjanjian Kerjasama / Petunjuk Teknis Kerjasama/ Pedoman



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 51 -

		Kerja antara LPSK dengan pihak eksternal di dalam negeri.
	01.01	Luar Negeri
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Perjanjian Kerjasama / Petunjuk Teknis Kerjasama/ Pedoman Kerja antara LPSK dengan pihak eksternal di luar negeri.
03	Evaluasi Jaringan Kerjasama Penguatan dan	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penguatan dan evaluasi jaringan kerjasama LPSK.	
HM	INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	
00	Keprotokolan	
	00.00	Penyelenggaraan Acara Kedinasan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara kedinasan diantaranya seperti upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari - hari besar dan hari nasional.
	00.01	Buku Tamu
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan buku tamu / daftar hadir tamu pejabat negara / penyelenggara negara / pejabat eselon I lainnya yang datang ke LPSK.
	00.02	Agenda Kegiatan Pimpinan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar agenda kegiatan pimpinan LPSK (Ketua dan Wakil Ketua LPSK, serta Pejabat Eselon I dan II).
	00.03	Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri Pimpinan dan Pejabat Eselon I LPSK mulai dari koordinasi persiapan keberangkatan hingga laporan pelaksanaan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 52 -

	00.04	Kunjungan Dinas Eksternal
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan dinas pihak eksternal ke LPSK baik dari dalam negeri (kunjungan Presiden, Wakil Presiden, Pejabat Negara dan lainnya) atau dari luar negeri.
	00.05	Daftar nama / alamat kantor / Pejabat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar nama, alamat kantor, kontak dan jabatan dari pejabat - pejabat yang menjadi mitra strategis LPSK.
01	Dokumentasi / Peliputan	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi / liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa penting dalam berbagai media seperti kertas, foto, video, rekaman suara, dan multi media.	
02	Pengumpulan, pengelolaan, dan Penyajian Informasi	
	02.01	Kliping Koran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan berita mengenai LPSK yang ada di media cetak maupun elektronik.
	02.02	Brosur/leaflet/poster/plakat
		Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencetakan atau pembuatan brosur / leaflet / poster / plakat.
	02.03	Pengumuman/pemberitaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumuman / pemberitaan resmi dari LPSK baik dari tahap konsep hingga tahap pengumuman.
03	Hubungan antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi	
	03.00	Hubungan Antar Lembaga Pemerintah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan Kementerian / Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah.
	03.01	Hubungan dengan Organisasi Sosial (LSM)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 53 -

	03.02	Hubungan dengan perusahaan atau pihak swasta
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan perusahaan atau pihak swasta.
	03.03	Hubungan dengan perguruan tinggi / sekolah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan perguruan tinggi / sekolah termasuk orientasi lapangan dan praktek kerja lapangan (PKL).
	03.04	Forum Kehumasan (Bakohumas / Perhumas)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kehumasan (Bakohumas dan Perhumas).
	03.05	Hubungan dengan media massa
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan membangun atau penguatan hubungan dengan media massa, diantaranya yaitu siaran pers / konferensi pers/ press release, kunjungan wartawan/peliputan, dan wawancara.
04	Bahan Materi Sidang atau Musyawarah Nasional	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan materi sidang DPR dan musyawarah nasional.	
05	Penerbitan Cetak	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan majalah, koran, kliping dari media cetak dan online, jurnal, buletin, booklet, dan leaflet.	
06	Publikasi	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi baik melalui media cetak, elektronik, atau online.	
07	Pameran, Sayembara, Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan Pameran, Sayembara, Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan.	
08	Pemberian penghargaan	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan, tanda kenang - kenangan, administrasi pemberian penghargaan, tanda kenang - kenangan kepada masyarakat atau tokoh yang memiliki jasa di bidang	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 54 -

	perlindungan saksi dan korban.	
10	Pemberian Ucapan	
	Naskah-naskah yang berhubungan dengan pemberian ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, dan permohonan maaf.	
11	Pidato atau Sambutan Pimpinan	
	11.00	Sambutan Pimpinan LPSK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan naskah pidato atau sambutan Pimpinan LPSK mulai dari pengumpulan bahan hingga konsep naskah pidato atau sambutan.
	11.01	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan naskah pidato atau sambutan Pejabat Eselon I dan Eselon II mulai dari pengumpulan bahan hingga konsep naskah pidato atau sambutan.
12	Pelayanan PPID	
	12.00	Permintaan Informasi Publik
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengajuan permohonan informasi publik yang ada di LPSK.
	12.01	Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik yang ada di LPSK.
	12.02	Pemberitahuan Tertulis Permintaan Informasi masih dalam proses
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberitahuan tertulis kepada pemohon mengenai Permintaan Informasi Publik yang masih dalam proses.
	12.03	Tanda Bukti Penyerahan Permintaan Informasi Publik
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian tanda bukti penyerahan permintaan informasi publik ketika informasi yang sudah tersedia sudah ada / siap diberikan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 55 -

	12.04	Pernyataan Keberatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pernyataan keberatan atas permohonan informasi termasuk dengan penyiapan bahan-bahan pendukungnya.
AR	KEARSIPAN	
00	Administrasi Persuratan	
	00.00	Kartu Kendali
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan administrasi persuratan (pengelolaan surat masuk dan surat keluar) yaitu kartu kendali.
	00.01	Buku Agenda
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan administrasi persuratan (pengelolaan surat masuk dan surat keluar) yaitu buku agenda.
	00.02	Lembar Pengantar / buku Ekspedisi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan administrasi persuratan (pengelolaan surat masuk dan surat keluar) yaitu lembar pengantar atau buku ekspedisi.
	00.03	Formulir / catatan permintaan dan layanan penggandaan dokumen / arsip
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permintaan dan layanan penggandaan dokumen / arsip.
01	Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip	
	01.00	Daftar Arsip
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan daftar arsip yang ada di Unit Kearsipan LPSK.
	01.01	Daftar Pencarian Arsip
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan daftar pencarian arsip yang ada di Unit Kearsipan LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 56 -

	01.02	Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan arsip seperti kegiatan pembersihan dan fumigasi ruangan.
02	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA).	
03	Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan arsip termasuk didalamnya kegiatan peminjaman dan penggunaan arsip.	
04	Penyusutan Arsip	
	04.00	Pemindahan Arsip
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip dari unit kerja ke unit kearsipan diantaranya yaitu berita acara pemindahan dan daftar arsip yang dipindahkan.
	04.01	Pemusnahan Arsip yang Tidak Bernilai Guna
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna diantaranya yaitu berita acara pemusnahan, daftar arsip yang dimusnahkan, rekomendasi, pertimbangan, dan persetujuan pemusnahan arsip dari unit kerja terkait serta surat keputusan pemusnahan.
	04.02	Penyerahan Arsip Statis
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip dari LPSK kepada ANRI diantaranya yaitu berita acara serah terima arsip dan daftar arsip yang diserahkan.
05	Berkas Proses Alih Media Arsip	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses alih media arsip.	
06	Pembinaan Kearsipan	
	06.00	Apresiasi, Sosialisasi dan Penyuluhan Kearsipan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan apresiasi, sosialisasi, lokakarya, workshop dan penyuluhan kearsipan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 57 -

		diantaranya seperti lomba tertib arsip, dan penilaian pengelolaan di unit kerja.
	06.01	Bimbingan teknis kearsipan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis kearsipan.
	06.02	Supervisi, evaluasi dan monitoring
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi, evaluasi dan monitoring pengelolaan arsip dinamis di lingkungan unit kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan evaluasi sistem kearsipan.
07	Akreditasi Kearsipan	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi kearsipan.	
08	Audit Kearsipan	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan audit kearsipan baik di internal maupun eksternal LPSK.	
PT	KEPUSTAKAAN	
00	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka	
	00.00	Bukti Penerimaan koleksi deposit bahan pustaka
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan bukti penerimaan koleksi deposit bahan pustaka.
	00.01	Administrasi pengolahan Deposit Bahan Pustaka
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pengolahan deposit bahan pustaka.
01	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	
	01.00	Buku Induk Koleksi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan buku induk koleksi perpustakaan.
	01.01	Daftar Buku Terseleksi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 58 -

		pengelolaan daftar buku terseleksi.
	01.02	Daftar Buku dalam pemesanan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan daftar buku dalam pemesanan.
	01.03	Daftar Buku dalam Permintaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan daftar buku dalam permintaan.
	01.04	Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah, deposit dan hibah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah, deposit dan hibah.
	01.05	Daftar Penerimaan bahan pustaka surplus
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan daftar penerimaan bahan pustaka surplus.
	01.06	Lembar kerja pengolahan BP (buram pengkatalogan)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan lembar kerja BP (buram pengkatalogan).
	01.07	Shelf List dan Master List
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan shelf list (Daftar buku di perpustakaan dengan entri yang singkat, ditulis pada kartu atau berkas, dan disusun sesuai dengan tempat buku dalam rak; jika susunannya berkelas, daftar ini merupakan katalog subjek tanpa entri tambahan, entri analitis, dan rujukan silang) dan Master List (Jajaran berisi informasi yang relatif permanen dan merupakan jajaran utama informasi).
	01.08	Daftar tambahan koleksi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan daftar tambahan koleksi yang baru.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 59 -

	01.09	Daftar jajaran kendali
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan daftar jajaran kendali (daftar catatan yang memuat keputusan pengatalogan di perpustakaan tertentu untuk menjamin ketaatasasan dalam praktik) misalnya subjek tertentu atau pengarang.
02	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	
	02.00	Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka.
	02.01	Pertanyaan, rujukan, dan jawaban
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertanyaan, rujukan, dan jawaban.
03	Preservasi Bahan Pustaka	
	03.00	Survei Kondisi Bahan Pustaka
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan survey kondisi bahan pustaka termasuk rencana kegiatan perawatan, perbaikan, perlindungan, dan pemeliharaan koleksi.
	03.01	Repografi Bahan Pustaka
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan repografi bahan pustaka.
	03.02	Fumigasi Bahan Pustaka
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fumigasi bahan pustaka.
KP	KEPEGAWAIAN	
00	Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian	
	00.00	Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 60 -

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian, pengusulan kebijakan, dan naskah akademik kepegawaian.
	00.01	Penyusunan kebijakan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan manajemen kepegawaian.
	00.02	Perumusan kebijakan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan kebijakan manajemen kepegawaian.
	00.03	Pemberian masukan dan dukungan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian masukan dan dukungan kebijakan manajemen kepegawaian.
	00.04	Penetapan kebijakan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kebijakan manajemen kepegawaian.
	00.05	<i>Memorandum of Understanding</i>
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan <i>Memorandum of understanding</i> kebijakan manajemen kepegawaian.
01	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	
	01.00	Perencanaan Kebutuhan ASN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan kebutuhan ASN diantaranya yaitu bahan penyusunan rencana kebutuhan, analisis kebutuhan PNS dan PPPK, dan pengolahan data kebutuhan ASN.
	01.02	Perencanaan Pertimbangan Formasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pertimbangan formasi diantaranya yaitu pertimbangan teknis penetapan formasi ASN dan formasi ikatan dinas.
	01.03	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kebutuhan ASN.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 61 -

	01.04	Standarisasi Jabatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi jabatan yaitu informasi jabatan, kompetensi jabatan, dan klasifikasi jabatan.
02	Formasi dan Pengadaan Pegawai	
	02.00	Formasi ASN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan formasi ASN diantaranya yaitu usulan formasi yang disertai dengan analisa jabatan dan beban kerja, usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan kepala BKN, persetujuan formasi, penetapan formasi, dan penetapan formasi khusus.
	02.01	Pengadaan ASN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan ASN diantaranya pertama yaitu proses penerimaan atau rekrutmen ASN yang meliputi pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta tes, pelaksanaan ujian tertulis/CAT, keputusan hasil ujian tertulis/CAT, pelaksanaan ujian kesehatan, pelaksanaan tes kemampuan bidang, wawancara dan keputusan kelulusan. Kedua penetapan pengumuman kelulusan, ketiga berkas lamaran yang tidak diterima, keempat nota usul dan kelengkapan penetapan NIP yang terdiri dari surat lamaran, ijazah, SKCK, dan surat keterangan kesehatan, kelima yaitu nota usul pengangkatan CASN menjadi ASN, dan keenam termasuk juga perencanaan dan pelaksanaan pendidikan prajabatan.
	02.02	Sistem Rekrutmen ASN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sistem rekrutmen ASN diantaranya pertama yaitu pengelolaan sistem rekrutmen yang meliputi standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai, kisi-kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian, evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi, dan fasilitas penyelenggaraan seleksi. Kedua



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 62 -

		yaitu pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian, ketiga penyelenggaraan dan pengolahan seleksi, keempat yaitu sertifikat dan pelaporan yang meliputi penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan dan pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi.
03	Mutasi Pegawai	
	03.00	Usulan Mutasi Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mutasi pegawai diantaranya yaitu Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, dan Pemindahan Sementara.
	03.01	Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persetujuan atau pertimbangan Kepala BKN.
	03.02	Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan berita acara pelantikan dan serah terima jabatan.
	03.03	Mutasi Keluarga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mutasi keluarga diantaranya yaitu surat izin pernikahan / perceraian, surat penolakan izin pernikahan / perceraian, akta nikah / cerai, akta kelahiran anak, dan surat keterangan meninggal dunia.
	03.04	Usulan kenaikan pangkat/golongan/jabatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan usulan naskah kenaikan pangkat/golongan/jabatan.
	03.05	Usul pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan usulan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 63 -

	03.06	Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan usulan penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai.
	03.07	Usulan Peninjauan Masa Kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan usulan peninjauan masa kerja.
	03.08	Berkas badan pertimbangan jabatan dan pangkat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dari badan pertimbangan jabatan dan pangkat.
04	Pengembangan Karir	
	04.00	Usulan Pengembangan Karir
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan usulan pengembangan karir diantaranya yaitu usulan tugas belajar, ijin belajar, diklat, kursus, magang, ujian dinas, praktek kerja di instansi lain/pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta.
	04.01	Surat tanda tamat pendidikan dan latihan (STTPL) / Sertifikat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan surat tanda tamat pendidikan/ latihan (STTPL) dan sertifikat.
	04.02	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi ASN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) bagi ASN.
	04.03	Pakta Integritas Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan pakta integritas pegawai.
	04.04	Laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 64 -

	04.05	Daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK).
	04.06	Disiplin pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan disiplin pegawai diantaranya seperti daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir.
	04.07	Berkas Hukuman Disiplin
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas hukuman disiplin.
	04.08	Penghargaan dan Tanda Jasa
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan dan tanda jasa.
05	Kinerja	
	05.00	Hasil Penilaian kinerja dan standar kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil penilaian kinerja dan standar kerja diantaranya yaitu sistem penilaian kinerja ASN, standar kinerja jabatan pegawai ASN, dan penilaian kinerja pegawai ASN.
	05.01	Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN, diantaranya yaitu mulai dari pengelolaan database, analisis sistem informasi kinerja pegawai, dan teknis penilaian kinerja ASN.
	05.02	Hasil Evaluasi dan Pemantauan Kinerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan hasil evaluasi dan pemantaun Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja ASN.
06	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
	06.00	Kode etik pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penegakan kode etik pegawai.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 65 -

	06.01	Disiplin Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penegakan dan peningkatan disiplin pegawai.
	06.02	Pemberhentian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai diantaranya yaitu pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara. Baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan pensiun atau tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya SK pensiun termasuk didalamnya pensiun duda/janda/anak dan Taspen.
	06.03	Pensiun
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pensiun diantaranya yaitu pertama administrasi pensiun ASN dan pejabat negara termasuk didalamnya perekaman dan pemeliharaan data pensiun, kedua penetapan pensiun ASN, ketiga penetapan pertimbangan teknis pensiun ASN, keempat yaitu pensiun ASN dan janda/duda/anaknya.
07	Bantuan Hukum	
	07.00	Pemberian Bantuan Hukum
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum pada pegawai.
	07.01	Bantuan Hukum Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum pegawai.
08	Status dan Kedudukan Pegawai	
	08.00	Pertimbangan Status Kepegawaian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertimbangan status kepegawaian diantaranya yaitu analisis status kepegawaian dan penyusunan pertimbangan status kepegawaian.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 66 -

	08.01	Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertimbangan kedudukan kepegawaian diantaranya yaitu analisis kedudukan kepegawaian dan penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian.
	08.02	Penyelesaian pengelolaan keberatan kepegawaian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian pengelolaan keberatan kepegawaian.
	08.03	Perselisihan / sengketa kepegawaian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian perselisihan/ sengketa kepegawaian.
09	Sistem Informasi Kepegawaian	
	09.00	Pengolahan data dan informasi kepegawaian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan data dan informasi kepegawaian diantaranya yaitu pertama kegiatan pengolahan data yang meliputi pengelolaan database kepegawaian ASN dan penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN, kedua kegiatan informasi kepegawaian meliputi penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN, penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN, dan pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik.
	09.01	Pengembangan sistem informasi kepegawaian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem informasi kepegawaian diantaranya yaitu pertama kegiatan arsip kepegawaian elektronik yang meliputi verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian, perekaman dan arsip kepegawaian, dan pengelolaan arsip kepegawaian elektronik, dan yang kedua yaitu kegiatan arsip kepegawaian fisik.
10	Pengawasan dan Pengendalian	
	10.00	Formasi, pengadaan dan pasca diklat



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 67 -

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan formasi, dan pelaksanaan pengadaan dan pasca diklat diantaranya yaitu pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi, dan rekomendasi, evaluasi, dan pelaporan.
	10.01	Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan diantaranya meliputi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi, serta rekomendasi, evaluasi dan pelaporan.
	10.02	Gaji, tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran gaji, tunjangan, kesejahteraan, dan kinerja diantaranya yaitu pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi serta rekomendasi, evaluasi dan pelaporan.
	10.03	Kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penegakan kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN diantaranya meliputi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi serta rekomendasi, evaluasi dan pelaporan.
	10.04	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
	10.05	Berkas sanggahan terhadap Permasalahan tenaga Honorer
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan berkas sanggaran terhadap Permasalahan tenaga honorer.
11	Administrasi Pegawai	
	11.00	Surat Perintah Dinas / Surat Tugas



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 68 -

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan surat perintah dinas / surat tugas.
	11.01	Cuti Sakit, cuti bersalin, dan cuti tahunan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan dan pengurusan cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti tahunan.
	11.02	Cuti Alasan Penting
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan dan pengurusan cuti karena alasan penting.
	11.03	Cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan dan pengurusan cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara.
	11.04	Dokumentasi identitas pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan dokumentasi identitas pegawai diantaranya yaitu usul penetapan karpeg, KPE, karis, dan karsu, keanggotaan organisasi profesi/kedinasan, lapiran pajak penghasilan pribadi (LP2P), keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai (KP4).
	11.05	Berkas kepegawaian dan daftar urut kepangkatan (DUK)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan berkas kepegawaian dan daftar urut kepangkatan (DUK).
	11.06	Berkas pengurusan kenaikan gaji berkala, mutasi gaji/tunjangan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan berkas pengurusan kenaikan gaji berkala. Mutasi gaji/tunjangan.
	11.07	Berkas Kehadiran Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan berkas kehadiran pegawai.
	11.08	Berkas status pegawai dan pendaftaran keluarga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan berkas status pegawai dan pendaftaran keluarga.
	11.09	Penghargaan pegawai



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 69 -

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan pengharagaan bagi pegawai.
12	Kesejahteraan Pegawai	
	12.00	Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan pemeliharaan kesehatan pegawai.
	12.01	Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/BPJS
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanna asuransi pegawai / BPJS.
	12.02	Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan tabungan perumahan.
	12.03	Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan bantuan social.
	12.04	Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan pakaian dinas.
	12.05	Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal Karena Dinas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan pegawai yang meninggal karena dinas.
	12.06	Berkas tentang Pemberian Tali Kasih
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan pemberian tali kasih.
	12.07	Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa.
	12.08	Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan olahraga dan rekreasi.
	12.09	Berkas tentang Medical Record



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 70 -

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan medical record.
13	Administrasi Perseorangan	
	13.00	Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Pegawai Negeri Sipil.
	13.01	Berkas Perseorangan PPPK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan PPPK.
	13.02	Berkas Perseorangan Anggota LPSK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Anggota LPSK.
	13.03	Berkas Perseorangan ASN yang berjasa atau terlibat dalam peristiwa berskala nasional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan ASN yang berjasa atau terlibat dalam peristiwa berskala nasional.
14	Penilaian Kompetensi	
	14.00	Berkas Penilaian Kompetensi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas penilaian kompetensi mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.
	14.01	Hasil Penilaian Kompetensi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil penilaian kompetensi.
15	Pendelegasian wewenang	
	15.00	Pelaksana Tugas (Plt.)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan dan penerbitan surat perintah Pelaksana Tugas (Plt.).
	15.01	Pelaksana Harian (Plh.)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan dan penerbitan surat perintah Pelaksana Harian (Plh.).



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

16	Perkumpulan Pegawai dan Non Pegawai	
	16.00	KORPRI
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perkumpulan KORPRI.
	16.01	Dharma Wanita
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perkumpulan Dharma Wanita.
	16.02	Koperasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perkumpulan koperasi.
	16.03	Lainnya
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perkumpulan pegawai lainnya.

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HASTO ATMOJO SUROYO

Salinan ini sesuai dengan aslinya



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

HASTO ATMOJO SUROYO